



DPRD Godok Raperda Ketahanan Keluarga

UMBULHARJO (MERAPI) - Permasalahan dalam rumah tangga seperti kekerasan, kenakalan remaja sampai pernikahan dini cenderung meningkat.

Untuk menekan permasalahan tersebut, DPRD Kota Yogyakarta tengah menggodok rancangan peraturan daerah ketahanan keluarga.

"Latar belakangnya keprihatinan terkait tingkat kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi, fenomena *married by accident* (pernikahan tidak direncanakan) hingga fenomena *klitih*. Ini perlu perhatian. Terutama pendidikan di lingkungan keluarga," kata Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Fauzi Noor Afshochi, Rabu (7/6).

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY mencatat pada tahun 2016 kekerasan fisik, psikologis dan seksual pada remaja perempuan pada usia 10-24 tahun mencapai 443 kasus. Perkawinan anak usia 18 tahun yang melakukan dispensasi kawin ada 343 kasus. Persalinan remaja per November 2016 mencapai 720 kasus.

Dia menjelaskan, raperda itu akan mengatur formal

hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga seperti perlindungan korban kekerasan. Pemenuhan hak-hak anak, suami dan istri. Selain itu terkait kematangan atau pendewasaan usia pernikahan dan persiapan-persiapan menuju pernikahan.

Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disebutkan batas usia pernikahan wanita minimal 16 tahun dan usai pria minimal 19 tahun. "Tentu kita akan pertimbangkan raperda jangan sampai ada pertentangan dengan aturan di atasnya. Tapi tetap ada kebijakan untuk pendewasaan usia pernikahan," tambahnya.

Raperda ketahanan keluarga yang telah masuk dalam Prolegda 2017 itu kini baru sampai pembahasan naskah akademik. Rapat dengar pendapat umum untuk menjarang

masuk dalam menyusun draf raperda juga telah dilakukan. Setelah naskah akademik raperda jadi, pihaknya akan mengusulkan pembentukan pansus untuk membahas raperda inisiatif dewan itu.

"Kita masih pertajam naskah akademik seperti detail peraturan dan sanksi hukumnya apa. Harapannya dengan adanya perda ketahanan keluarga tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dan anggota keluarga yang ditelantarkan," papar Fauzi.

Secara terpisah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Yogyakarta, Eny Retnowati mengakui kecenderungan pernikahan usia dini meningkat. Dia menyebut angka pernikahan dini tingkat nasional tahun 2012 sebanyak 26 kasus/1.000 pernikahan dan pada tahun 2013 menjadi 32 kasus/1.000 pernikahan.

"Banyak sekali sekarang pernikahan di bawah umur 20 tahun. Padahal secara kondisi kesehatan perempuan di bawah umur 20 tahun belum siap dibuahi. Masih rentan," imbuh Eny. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005